

Perhitungan Pembangunan Jalan Diharapkan Lebih Seksama



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/303845/perhitungan-pembangunan-jalan-diharapkan-lebih-seksama>

Wakil Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Rosehan Noor Bahri SH mengharapkan, perhitungan pembangunan jalan di provinsinya agar cermat atau seksama. Harapan itu dia kemukakan menjawab Antara Kalsel, usai menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat dengan eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut di Banjarmasin, Rabu (29/12) siang. Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengaku kecewa melihat hasil pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi jalan di Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala (Batola). Begitu pula pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut (Tala) hasilnya mengecewakan, tegas Wakil Gubernur Kalsel periode 2005 - 2010 itu. "Oleh karena itu, saya minta dalam pembangunan jalan tersebut harus dengan perhitungan yang lebih seksama dan secermat mungkin, baik berkaitan anggaran maupun situasi dan kondisi lapangan (termasuk perkiraan cuaca)," ujarnya. "Sebab dari hasil monitoring saya ke Batola dan Tala, 27 - 29 Desember lalu, alasan kontraktor karena cuaca sehingga pekerjaan mereka tidak bisa maksimal atau hanya mencapai sekitar 83 persen," ungkap laki-laki yang juga dengan panggilan Julak Rose tersebut.

Wakil asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan mengaku, tidak bisa berbuat banyak terhadap pembangunan jalan di Batola dan Tala tersebut, karena proyek nasional yang pembiayaannya dari APBN. "Kita selaku wakil rakyat di daerah hanya sebatas mengingatkan atau menaruh harapan agar hal serupa tidak terulang pada proyek-proyek mendatang yang pembiayaannya dari pemerintah pusat," demikian Julak Rose. Perkataan Julak berasal dari bahasa daerah Banjar, Kalsel yang penggunaannya panggilan terhadap orang yang dituakan atau saudara tua dari seseorang. Pada kesempatan kunjungan kerja dalam daerah provinsi setempat, Komisi III terbagi dua yaitu ke Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara (HSU) dipimpin Ketuanya H Sahrujani. Rombongan Ketua Komisi III itu meninjau hasil rehabilitasi jalan Amuntai HSU - Kelua - Tanjung Kabupaten Tabalong. Kemudian ke Batola dan Tala dengan pimpinan Rosehan NB.

Sementara pada sumber yang berbeda disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa banyak orang mempertanyakan langkah pemerintah yang terus membangun infrastruktur . Bahkan dia mengatakan ada yang mengatakan bahwa rakyat tidak makan aspal. "Di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur. Baik itu jalan tol, baik itu pelabuhan, bandara. Yang kita bangun banyak yang mempertanyakan untuk apa. Rakyat tidak memakan aspal dan lain-lainnya. Ada yang mempertanyakan masalah itu," katanya dalam acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (22/12/2021). Ada yang Biayanya Tembus Rp8.561 Triliun Jokowi menegaskan, bahwa hal ini dilakukan untuk menggenjot daya saing Indonesia. Menurutnya infrastruktur adalah bagian pembangunan peradaban. Dia pun menegaskan bahwa apapun cacian dan hinaan akan tetap terus membangun infrastruktur. "Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luanya. Kalau pondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun cacian hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini," tegasnya. Dia juga mengungkapkan, bahwa pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur skala besar. Menurutnya pemerintah juga mengurus hal-hal yang kecil. Hal ini dilihat dari dana desa yang ditransfer pemerintah pusat yang mencapai Rp.400,1 triliun. "Untuk membangun jalan desa, untuk membangun embung, untuk membangun irigasi, jembatan. Jembatan kecil-kecil di desa, pasar rakyat desa, BUMDes. Urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Jangan berpikir, karena yang gede yang kelihatan itu memang tol. Tapi yang kecil-kecil kita urus," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/303845/perhitungan-pembangunan-jalan-diharapkan-lebih-seksama>, *Perhitungan pembangunan jalan diharapkan lebih seksama*, 30 Desember 2021.
2. <https://ekbis.sindonews.com/read/636381/34/jokowi-apapun-cacian-dan-hinaan-pembangunan-infrastruktur-jalan-terus-1640182351>, *Jokowi: Apapun Cacian dan Hinaan, Pembangunan Infrastruktur Jalan Terus*, 22 Desember 2021.

Catatan Berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.¹
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.²
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.³
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima)

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

² Ibid, Pasal 1 angka (2)

³ Ibid, Pasal 1 angka (3)

tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.⁴

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.⁵
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.⁶
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.⁷
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.⁸
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.⁹
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.¹⁰
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.¹¹
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air

⁴ Ibid, Pasal 1 angka (4)

⁵ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 2 ayat (2)

⁷ ibid, Pasal 6 ayat (1)

⁸ ibid, Pasal 6 ayat (2)

⁹ ibid, Pasal 6 ayat (3)

¹⁰ ibid, Pasal 7 ayat (1)

¹¹ ibid, Pasal 7 ayat (2)

¹² ibid, Pasal 7 ayat (3)

secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.¹³

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.¹⁴

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.¹⁵
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.¹⁶

¹³ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

¹⁴ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

¹⁵ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

¹⁶ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.¹⁷
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.¹⁸
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.¹⁹
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.²⁰
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.²¹

¹⁷ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

¹⁸ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

¹⁹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

²⁰ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

²¹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.²²
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.²³
- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.²⁴

²² Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

²³ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

²⁴ Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22